

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinas Kesehatan salah satu lembaga pemerintah yang menangani berbagai macam urusan terkait permasalahan kesehatan. Dinas Kesehatan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang Kesehatan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dipergunakan dalam menanggulangi berbagai permasalahan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang – Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesehatan yang setinggi– tingginya mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia agar bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Kesehatan warga negara merupakan salah satu model utama bagi suatu negara agar dapat melaksanakan pembangunan.

Dalam Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 Nomor 1 menyatakan bahwa tujuan Pembangunan berkelanjutan/*sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Yang Dimana berkaitan dengan hal ini masuk ke dalam tujuan nomor 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, salah satu fokus dari seluruh target tersebut adalah gizi masyarakat. Pembangunan kesehatan sebagai bagian proses dari pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Bidang Kesehatan (RPJPK).

Pembangunan di bidang kesehatan yang lebih baik tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan memiliki tingkat kesehatan yang baik. Maka diperlukan aparatur yang bekerja di bidang kesehatan yang memiliki kinerja sebaik mungkin dan konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kesuksesan Pembangunan Masyarakat sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang bagus serta berkualitas yaitu, memiliki fisik kuat, ketangguhan mental, kesehatan yang baik, serta cerdas. Anak sebagai generasi penerus bangsa diharapkan menjadi SDM yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya faktor pendidikan yang harus di tingkatkan, namun faktor gizi pun juga harus di perhatikan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, bahwa gizi adalah investasi bangsa, jangan sampai ada lagi yang namanya gizi buruk. Tidak ada anak yang sepatasnya kekurangan

gizi di negara berpendapatan menengah seperti sekarang ini. Berdasarkan pernyataan beliau mencerminkan bahwa anak-anak merupakan asset berharga bagi negara yang akan menjadi generasi penerus masa depan bangsa.

Dengan demikian dibutuhkan anak-anak yang berkualitas agar tercapai masa depan bangsa yang cerah. Untuk mendapatkan kualitas anak yang terbaik, harus dipastikan juga bahwa tumbuh dan kembangnya berjalan dengan baik. Sertatidak lupa di persiapkan juga kualitas dari segi kesehatan dan gizi anak tersebut harus terpenuhi karena akan mempengaruhi generasi selanjutnya.

Kenyataan nya, pada saat ini masih banyak terdapat masalah yang diakibatkan oleh gizi tersebut. Dimana negara Indonesia yang merupakan negara berkembang memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan masalah gizi pada balita, hal ini menjadi titik pusat pemerintah Indonesia lantaran masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak atau di sebut *stunting*. *Stunting* atau (tubuh pendek) pada balita merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia yakni tingginya prevalensi anak balita pendek (*stunting*). Kejadian tersebut merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita.

Kondisi *stunting* sangat berpengaruh dan berkaitan dengan penurunan Tingkat kecerdasan Sumber Daya Manusia Indonesia dimasa mendatang. Hal ini di dukung oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan *Stunting*, supaya Indonesia bebas *stunting* di masa yang akan mendatang.

Stunting terjadi pada saat keadaan tubuh ditandai dengan sebuah kondisi Dimana tinggi badan anak ternyata lebih pendek disbanding tinggi badan anak-anak lain pada umumnya (yang seusia). *Stunting* yang diderita anak akan sangat rentan pada setiap peningkatan baik penikatan secara morbiditas serta, ketika anak beranjak dewasa akan beresiko menderita penyakit degeneratif. *Stunting* bukan hanya berdampak pada ukuran fisik pendek,tetapi dengan adanya hambatan pertumbuhan dan perkembangan organ lainnya, termasuk otak yang membuat seorang anak kurang berkembang. Yang berkemungkinan 1 dari 3 anak Indonesia akan kehilangan peluang lebih baik dalam hal pendidikan dan pekerjaan dalam sisa hidup mereka. Adapula dampak buruk *stunting* dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Selain itu masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah, karena anak pendek di masyarakat terlihat sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal, tidak seperti anak kurus yang harus ditanggulangi. Demikian pula hal nya gizi ibu waktu hamil, masyarakat belum menyadari pentingnya gizi selama kehamilan berkontribusi terhadap keadaan gizi bayi yang akan dilahirkan kelak.

Gambar 1.1
Status Gizi Balita Indonesia 2013-2022

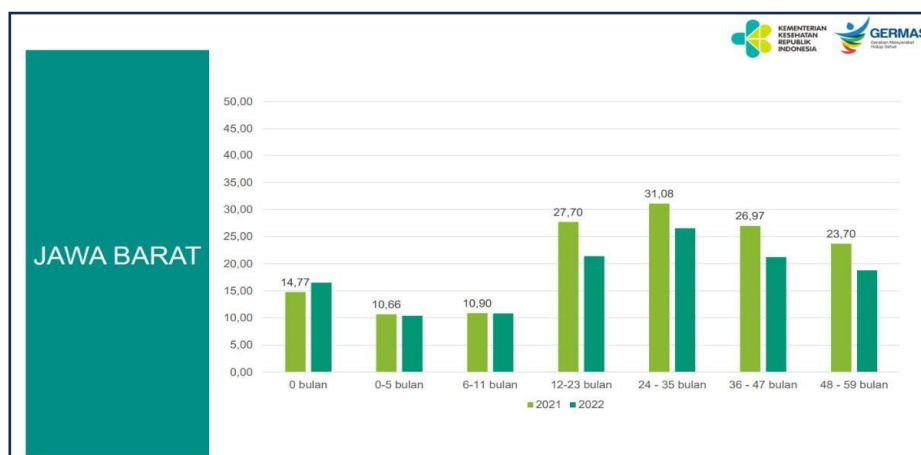
TREN STATUS GIZI BALITA INDONESIA					
	Hasil Riskesdas		Hasil SSGI		
	2013	2018	2019	2021	2022
<i>Stunting</i>	37,6	30,8	27,7	24,4	↓ 2,8 21,6
<i>Wasting</i>	12,1	10,2	7,4	7,1	↑ 0,6 7,7
<i>Underweight</i>	19,6	17,7	16,3	17,0	↑ 0,1 17,1
<i>Overweight</i>	11,8	8,0	4,5	3,8	↓ 0,3 3,5

Sumber: Dinas Kesehatan Indonesia 2022

Pada kenyataannya Indonesia belum bebas dari gizi buruk. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2022 diatas, prevalensi *stunting* di Indonesia turun sebanyak 2,8% poin dibanding tahun 2021 dari 24,4% menjadi 21,6%. Data Word Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi *stunting* Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia.

Berdasarkan data UNICEF dan WHO angka prevalensi *stunting* Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara yang memiliki data *stunting*, menjadikan Indonesia berada di urutan ke-5 diantara negara-negara di Asia. Di Provinsi Jawa Barat, pemprov terus mendorong upaya penanganan permasalahan gizi terhadap anak tidak hanya di tahun ini saja, bahkan sejak beberapa tahun lalu. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Provinsi Jabar berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* 10,9 persen dari 31,1 persen di tahun 2018. Sedangkan sampai 2022 rata-rata penurunan angka *stunting* dipastikan mencapai 2,72 persen pertahun.

Gambar 1.2
Data *Stunting* Jawa Barat

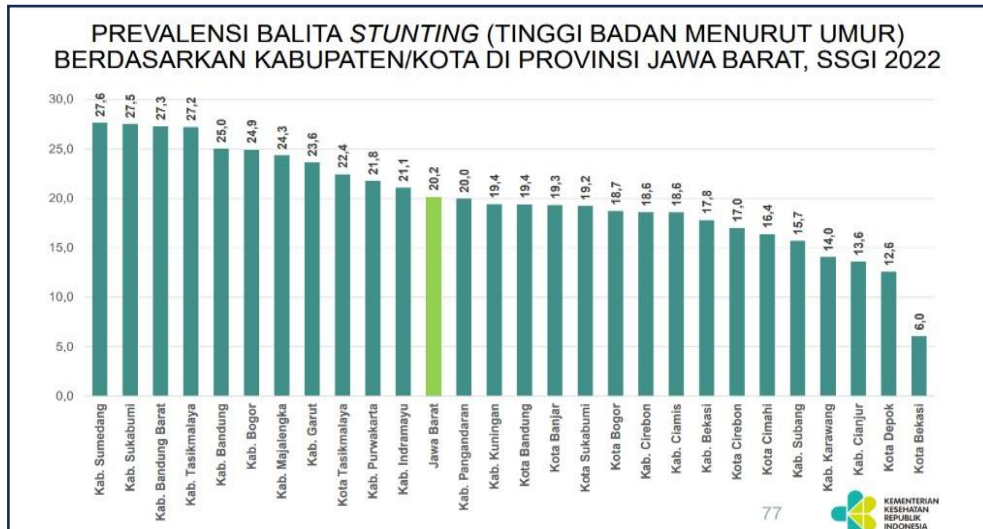


Sumber: Kementerian Kesehatan 2022

Kejadian balita pendek atau *stunting* ini merupakan salah satu masalah gizi yang cukup penting untuk segera ditangani. Mempersiapkan generasi penerus bangsa itu harus dimulai dengan memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat berperan menciptakan generasi yang bermutu di Indonesia, dengan memperkaya pengetahuan dan berperan menciptakan generasi yang bermutu di Indonesia, dengan memperkaya pengetahuan sebelum berkeluarga mengenai *stunting*. Dengan mempersiapkan generasi bebas *stunting* akan muncul bonus demografi. Bonus demografi ialah kondisi penduduk usia produktif berada pada proporsi yang lebih besar dibandingkan jumlah nonproduktif. Indonesia menikmati bonus demografi sejak tahun 2000, dan bergerak menuju terbukanya *windows of opportunity* di 2020-2030, yaitu ketika rasio ketergantungan pada level yang terendah yaitu 44 per 100 orang usia produktif. Tetapi rasio ini akan meningkat lagi sesudah 2030 karena meningkatnya penduduk lanjut usia (lansia).

Kabupaten Bandung Barat saat ini masih menghadapi permasalahan *stunting* yang membahayakan kehidupan anak, *stunting* sangat berpotensi merugikan negara secara finansial dan non materi. *Stunting* dapat dicegah apabila orang tua menyadari pentingnya asupan gizi, serta merencanakan kehamilan dan pernikahan. Dapat dilihat dari tabel mengenai Data angka *stunting* di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Gambar 1.3
Data *Stunting* Kab/Kota di Prov.Jawa Barat



Sumber: Kementerian Kesehatan 2022

Prevalensi balita *stunting* atau kondisi gagal tumbuh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menempati urutan ketiga tertinggi di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2022. Presentase balita *stunting* Bandung Barat mencapai 27,3persen, artinya, jika terdapat 100 orang populasi balita di KBB, sebanyak 27 orang menderita *stunting*. Angka ini prevalensi Bandung Barat ini terpaut tipis dari dua kabupaten lain yakni Sukabumi dengan presentase 27,5 persen dan Kabupaten Sumedang diurutkan teratas dengan prevalensi 27,6 persen. Berdasarkan data diatas Kabupaten Bandung Barat dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan angka *stunting*, namun Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 mengalami kenaikan angka *stunting*. Pada tahun 2020 total anak yang terkena *stunting sebesar* 13,57% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 11,85% lalu menurun Kembali pada tahun 2022 sebesar 8,15%, dan di upayakan untuk menurun setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Administrasi

Pemerintah Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa fungsi pemerintah adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dalam fungsi tersebutlah, permasalahan *stunting* bisa diatasi ketika pemerintah memahami masalah dan mengetahui cara mengatasinya dengan pemberdayaan masyarakat.

Kasus kekurangan gizi atau *stunting* di Kabupaten Bandung Barat masih tinggi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Hal ini harus segera diatasi dengan berbagai program pencegahan *stunting* dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat salah satunya memberi edukasi agar masyarakat itu tau, mau, dan mampu untuk menerapkan pola hidup sehat, agar tidak mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak kedepannya.

Permasalahan *stunting* di Kabupaten Bandung Barat belum bisa diatasi dengan pemberian vitamin pada anak saja, melainkan harus sering memberikan sosialisasi pada orang tua penting nya kualitas gizi pada anak. Oleh sebab itu pemerintahan Kabupaten Bandung Barat membuat program kerja untuk mengatasi *stunting*.

Dalam upaya targetkan nol kasus *stunting* pada tahun 2024 pemerintahan Kabupaten Bandung Barat membuat program yaitu:

1. Getol Mealing

Getol Mealing adalah Gerakan Makan Telur Minimal Sebutir oleh Ibu Hamil. Dengan komitmen ini pemerintah berharap dengan asupan nutrisi dari kandungan dapat menurunkan kasus *stunting* pada anak di kabupaten

Bandung Barat. Kebutuhan pemenuhan gizi di 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), yaitu saat hamil dan menyusui hingga anak berusia 2 tahun menjadi pondasi penting untuk mencegah *stunting* sejak awal dengan pemenuhan gizi sehat dan seimbang bisa membantu mencetak generasi-generasi gemilang yang tumbuh dan berkembang dengan baik.

Angka *stunting* di Bandung Barat tergolong cukup tinggi dan berada di angka 32 persen pada tahun 2022 oleh karenanya pemerintah Kabupaten Bandung Barat berinovasi dengan program Getol Mealing (Gerakan Makan Telur Minimal Sebutir oleh Ibu Hamil), serta menghimbau agar ibu hamil gemar memakan ikan dan rutin minum susu ibu hamil dan menyusui untuk memenuhi gizi calon bayi.

2. Pembentukan Tim TPPS dan TPK

TPPS adalah Tim percepatan Penurun *stunting* sedangkan kan TPK adalah Tim Pendamping Keluarga. Dengan dibentuknya tim tersebut pemerintah berupaya dapat menurunkan angka *stunting* di Bandung Barat dan sebagai bentuk nyata pembkab Bandung Barat dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bandung Barat Yang berkualitas.

Kabupaten Bandung Barat memiliki 32 Kecamatan dan 165 Desa, dimana dibeberapa Kecamatan memilki angka *stunting* yang cukup tinggi seperti pada table dibawah ini:

Tabel 1.1
Data *Stunting* di Puskemas Kabupaten Bandung Barat

NO	NAMA KECAMATAN	2023	2024	Jumlah
1	RONGGA	26	37	63

2	GUNUNGHALU	163	73	236
3	SINDANGKERTA	183	291	474
4	CICANGKANGGIRANG	446	465	911
5	CILILIN	84	83	167
6	MUKAPAYUNG	41	73	114
7	CIHAMPELAS	256	221	447
8	PATARUMAN	403	627	1030
9	CIPONGKOR	348	381	729
10	CITALEM	187	114	301
11	BATUJAJAR	176	412	588
12	SAGULING	330	330	660
13	RAJAMANDALA	343	436	779
14	CIPATAT	224	353	577
15	SUMUR BANDUNG	308	302	610
16	PADALARANG	167	379	546
17	TAGOGAPU	87	123	210
18	JAYAMEKAR	84	159	243
19	NGAMPRAH	87	229	316
20	CIMAREME	276	365	641
21	PARONGPONG	300	467	767
22	CIWARUGA	65	226	291
23	JAYAGIRI	25	148	173
24	LEMBANG	111	121	232
25	CIKOLE	71	92	163
26	CIBODAS	18	37	55
27	CISARUA	120	95	215
28	PASIRLANGU	168	171	339
29	CIKALONGWETAN	268	274	542
30	RENDE	87	151	238
31	CIPEUNDEUY	147	204	351
32	CIRATA	165	147	312
JUMLAH		7787	9610	13320

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 Diatas dapat dilihat dari bahwa jumlah anak yang terdampak *stunting* pada tahun 2023 ke 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Memasuki tahun 2024, situasi *stunting* di beberapa kecamatan justru semakin memburuk. Pataruman mencatat lonjakan signifikan menjadi 627 kasus, begitu pula Sindangkerta yang melambung tinggi hingga 291 kasus. Kecamatan Batujajar dan Rajamandala juga mengalami peningkatan tajam, masing-masing

menjadi 412 dan 436 kasus.

Namun, ada pula kecamatan yang berhasil menurunkan angka *stunting*, seperti Gununghalu yang turun dari 163 kasus pada 2022 menjadi 73 kasus pada 2024. Cihampelas dan Cirata juga mencatat penurunan, meski tidak sebesar Gununghalu:

Tabel 1.2
Data *Stunting* Puskemas Padalarang

NAMA DESA	2023	2024
LAKSANAMEKAR	44	54
CIPENDEUY	37	55
KERTAJA	54	114
KERTAMULYA	36	69

(Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024)

Berdasarkan data tersebut Desa Kertajaya memiliki lonjakan kasus sebesar 114 anak yang terkena *stunting* pada tahun 2024, telah ditemukan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Desa Kertajaya merupakan Desa yang memiliki angka *Stunting* yang cukup tinggi di Tingkat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Pada observasi awal ditemukan bahwa anak yang terkena *stunting* di akibatkan beberapa faktor diantaranya ibu hamil yang masih dibawah umur, pengetahuan yang masih kurang tentang kesehatan ibu dan bayinya menyebabkan angka *stunting* menjadi tinggi di Desa Kertajaya.

Disisi lain ditemukan permasalahan yang terjadi di Desa Kertajaya dimana tidak berjalan lagi program bupati Kabupaten Bandung Barat seperti salahsatunya *Getol Mealing* dan minimnya kesadaran Masyarakat tentang edukasi penting nya gizi seimbang, pola asuh yang baik, dan praktik kebersihan dapat menjadi

penghambat dalam upaya mengatasi *stunting*.

Desa Kertajaya dipilih sebagai fokus penelitian ini karena memiliki angka prevalensi *stunting* yang cukup tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Padalarang. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan gizi yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Selain itu, Desa Kertajaya memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang khas, yang memberikan konteks penting dalam memahami bagaimana strategi penanggulangan *stunting* diterapkan di tingkat lokal.

Dengan meneliti Desa Kertajaya, diharapkan dapat diperoleh wawasan mendalam mengenai efektivitas program pemerintah daerah dalam mengatasi *stunting*, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Studi ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan keberhasilan upaya penanggulangan *stunting* di masa depan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat akhir-akhir ini menjadi perhatian penting dalam menjalankan tugas dan fungsi nya di bidang pemerintahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dinilai masih menjadi suatu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah dalam mengatasi *stunting*.

Banyak sekali penelitian yang telah dilakukan terkait dengan *stunting* seperti penelitian yang di publiskasih dalam jurnal pada table 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

no	Peneliti	Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Citrakesumasari, DKK	Pencegahan <i>Stunting</i> Melalui Pemberdayaan Kader PKK Kecamatan Barebbo di Kabupaten Bone	Pelatihan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan kader PKK dalam melakukan pengukuran antropometri. Hal tersebut penting dalam melakukan pencegahan <i>stunting</i> pada balita	Tujuan Penelitian: Kedua penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu menanggulangi masalah <i>stunting</i> dalam masyarakat. Penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak serta masyarakat secara umum melalui	Penelitian tersebut melakukan sebuah Pelatihan kepada para Kader PKK sedangkan peneliti dalam hal ini ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah KBB dan Desa Kertajaya dalam rangka mempersiapkan generasi bebas

				strategi pencegahan <i>stunting</i> .	<i>stunting</i> melalui edukasi
2	Febi Rama Silpia	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan <i>Stunting</i> (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) Di Desa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan.	Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan <i>stunting</i> didesa pancasila dianggap berhasil. Karena pemerintah desa telah dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah yang telah mereka hadapi yaitu <i>stunting</i> . Dan hal tersebut	Tujuan Penelitian: 1.Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak sertamasyarakat secara Keseluruhan melalui Upaya pencegahan dan pananggulangan <i>stunting</i> Fokus Penelitian: 1.kedua penelitain memusatkan perhatian pada	Pada penelitian tersebut meneliti tentang pemberdayaan yang dilakukan untuk mengedukasi Masyara mengenai pencegahan <i>Stunting</i> sedangkan peneliti dalam hal ini ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah KBB dan Desa

			dapat diselesaikan dengan sudah mulai produktifnya pemeriksaan ibu hamil dengan mengkonsumsi pil tambah darah, perubahan makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak balita, sanitasi yang sudah baik, lingkungan yang baik, dan air yang layak konsumsi	Upaya pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi <i>stunting</i>	Kertajaya dalam rangka mempersiapkan generasi bebas <i>stunting</i> melalui edukasi.
--	--	--	---	--	---

3	Muhammad Hafizam	Peran Rumoh Gizi Gampong (RGG) Dalam Pencegahan <i>Stunting</i> Di Desa AraKembang Tanjong Kabupaten Pidie. Kecamatan	Rumoh Gizi Gampong (RGG) dalam Pencegahan <i>stunting</i> di Desa Meunasah Ara berperan penting dalam turunnya angka <i>stunting</i> di desa Meunasah Ara. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan kelengkapan sarana prasara menjadi salah satu peluang keberhasilan program Rumoh Gizi Gampong (RGG) dalam	Kedua penelitian mungkin menggunakan kerangka kerja yang serupa dalam menganalisis peran institusi atau program kesehatan dalam pencegahan <i>stunting</i> . Penelitian ini mungkin juga mengidentifikasi peran serta faktor- faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya dalam menentukan tingkat <i>stunting</i> di	Pada penelitian tersebut meneliti tentang Peran Rumoh Gizi Gampong (RGG) Dalam Pencegahan <i>Stunting</i> . sedangkan peneliti dalam hal ini ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah KBB dan Desa Kertajaya dalam rangka mempersiapkan generasi bebas <i>stunting</i> melalui edukasi.
---	---------------------	---	---	---	---

			melaksanakan kegiatan pencegahan <i>stunting</i> dan salah satu tantangan kegiatan RGG ialah anggaran yang sangat terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan sedikit terhambat karena kurangnya anggaran yang diberikan.	masyarakat.	
4	Siti Haryani , Ana Puji Astuti , Kartika Sari	Pencegahan <i>Stunting</i> Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan	Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam beberapa langkah yaitu	Kedua penelitian bertujuan untuk memberikan dampak positif	Pada penelitian tersebut meneliti tentang Pencegahan

		Komunikasi Informasi dan Edukasi Di Wilayah Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	observasi lokasi mitra, penyuluhan kesehatan tentang <i>Stunting</i>, pemberian edukasi tentang cara berperilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan mencuci tangan dan cara pemberian Makanan tambahan dengan bubur tempe. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan 2 tahap	yang signifikan dalam mengurangi angka <i>stunting</i> dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah studi mereka masing-masing. Baik penelitian tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Candirejo maupun strategi pemerintah di Desa Kertajaya kemungkinan memberikan rekomendasi	melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Sedangkan peneliti dalam hal ini ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah KBB dan Desa Kertajaya dalam rangka mempersiapkan generasi bebas <i>stunting</i> melalui
--	--	--	---	--	---

			yaitu pada tanggal 5 Januari dan 12 Januari 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang.	yang serupa dalam hal program-program intervensi yang efektif dan kebijakan yang mendukung.	edukasi.
--	--	--	--	---	----------

(Sumber:Hasil Olahan Peneliti,2024)

Memperhatikan dari penelitian terdahulu terkait *stunting*, bahwa penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu karena saya lebih fokus kepada strategi pemerintah dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bandung Barat khususnya di Desa Kertajaya dan menggunakan teori geof mulgan.

Peneliti tertarik untuk meneliti selanjutnya bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Bandung barat dalam penanggulangan kasus *stunting*, Peneliti menentukan topik penelitian dan mengakatnya kedalam sebuah penelitian kualitatif dengan judul “STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM PENANGGULANGAN KASUS STUNTING DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN PADALARANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung

Barat dalam Penanggulangan Kasus *stunting* di Desa kertajaya dari aspek Tujuan, Lingkungan, Pengarahan, Tindakan, dan Pembelajaran?

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan *stunting* di Desa Kertajaya.

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam peneliti ini adalah:

1. Untuk menentukan Tujuan Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan *stunting*.
2. Untuk menganalisis Lingkungan Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan *stunting*.
3. Untuk menggambarkan Pengarahan Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan *stunting*.
4. Untuk menilai Tindakan Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan *stunting*.
5. Untuk menganalisis Pembelajaran Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan *stunting*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengemukakan adanya kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori strategi sebagai sarana pengembangan Ilmu Pemerintahan yang secara teoritis dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Kegunaan secara praktis kemudian terbagi menjadi sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan memberikan pemahaman yang bermanfaat dalam berjalannya Strategi Pemerintah dalam suatu Instansi. Disamping itu, peneliti ingin mengetahui atau membandingkan tingkat kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b) Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan ide baru bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk dijadikan bahan evaluasi sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan agar angka *stunting* pada anak di Kabupaten Bandung Barat tidak semakin meningkat.

c) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di masa pendatang.

d) Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang akan melaksanakan penelitian di masa mendatang.

e) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat bahwa pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat ada dan hadir untuk memberi Solusi dan jalan keluar untuk segala keadaan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Khusus nya untuk para ibu hamil.